

KONSENTRASI DAN KUALITAS PERGURUAN TINGGI SWASTA (SUATU STUDI PADA LLDIKTI WILAYAH XIV PAPUA DAN PAPUA BARAT)

Metha Gomie

Akademik Perikanan Biak

Email : methagomies2@yahoo.com

ABSTRACT

In an effort to improve the nation's competitiveness through tertiary institutions in Eastern Indonesia (KTI), this study aims to find out how far the concentration of Private Universities (PTS) and the quality of PTS in Regional XIV, Papua, and West Papua LLDIKTI, by using: (1) Simple statistical analysis tools, to identify the location of the education service industry and in which areas they tend to group spatially; and (2) Table Analysis, to see the quality of PTS.

Found: the first model, Geographically it appears that at the provincial level there were 41 private universities or 68.33 percent of the 60 private universities concentrated in Papua Province, and in West Papua Province which was 31.67 percent. While at the district / city level, it describes that those included in the high concentration group are in all cities in each province in the Region XIV LLDIKTI in high classification (City: Jayapura, and Sorong), has around 22 PTS or 36.67% of the total PTS. While the included in the middle classification with the number of PTS as many as 35 PTS or 58.33% (Regency: Jayapura, Biak Numfor, Mimika, Merauke, Jayawijaya, Sorong, Manokwari, and Fakfak), and those included in the low classification are as many as PTS 3 PTS or 5.00% (Regency: Nabire, Yapen Waropen, and Bintuni); in the second model, the quality of PTS seen according to the Institutional Accreditation status shows that there are only 23 private universities or around 38.33% in the area of LLDIKTI Wilayah XIV, which is accredited. Study Program Accreditation shows that out of 238 study programs, which have been accredited by BAN-PT as many as 215 or around 90.34% of study programs that have been accredited. However, most of the study programs are still accredited C, which is 149 study programs or around 69.30%. While the remaining is B cited as many as 66 study programs or 30.70%.

It is suggested: (1) the government needs attention in overcoming the concentration level of PTS which tends to be in the city center, both through improving the quality of human resources (HR) and regional economic development; (2) government attention is needed in preparing human resources in each region that can be a leader for efforts to improve the quality of PTS in meeting the expectations of the Ministry of Research and Technology; (3) an expanded institutional capacity building program is needed.

Keywords: *Spatial Concentration, PTS Quality, Accreditation*

1. PENDAHULUAN

Dalam dasa warsa terakhir ini, upaya untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses, serta peningkatan daya saing mutu pendidikan tinggi di Indonesia merupakan bagian dari

Rencana Strategis (Renstra) Kemenristekdikti Republik Indonesia dengan memperhatikan perkembangan global, regional, nasional, maupun lokal yang terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs), dalam era

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Trisakti dan Nawacita (Renstra Kemenristekdikti: 2015-2019).

Walaupun demikian, masih banyak agenda yang tersisa untuk dibicarakan dalam upaya pemerataan dan perluasan akses, serta peningkatan daya saing mutu pendidikan tinggi. Salah satu yang cukup menonjol adalah masalah keterbelakangan mutu Perguruan Tinggi di Kawasan Timur Indonesia, mengingat beberapa tahun terakhir ini, bahkan sejak ditetapkannya Renstra Kemenristekdikti 2015-2019, isu mengenai peningkatan mutu pendidikan tinggi muncul ke permukaan. Namun sayangnya sampai saat ini masih terjadi kesenjangan kemajuan antara Perguruan Tinggi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kondisi riil tampaknya disebabkan adanya konsentrasi ekonomi secara spasial, cukup mempengaruhi konsentrasi lembaga pendidikan tinggi di suatu wilayah.

Menurut Kuncoro (2002 dan 2009), ciri paling mencolok aktivitas ekonomi secara

geografis adalah konsentrasi dan ketimpangan (*unevenness*). Konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial dalam suatu negara menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan suatu proses selektif dipandang dari dimensi geografis. Pandangan ini tampaknya tidak lepas dari adanya pengelompokan industri secara spasial yang terjadi di negara sedang berkembang termasuk di Indonesia.

Tampaknya pandangan di atas, sejalan dengan yang terjadi pada industri jasa pendidikan tinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), yang menunjukkan fenomena yang sama dengan aktivitas industri manufaktur. Kenyataan menunjukkan bahwa telah terjadi ketimpangan jumlah lembaga pendidikan tinggi swasta baik secara regional maupun secara spasial pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat. Untuk lebih jelasnya, gambaran mengenai hal ini dapat diikuti pada tabel berikut.

Tabel 1
Bentuk dan Jumlah PTS
Pada LLDIKTI Wilayah XIV, Papua dan Papua Barat
Per September 2018

Provinsi	Univ.	Inst.	S.Tinggi	Poltek	Ak.	Ak. Komunitas	Jumlah	Share (%)
Papua	6	1	22	2	8	1	41	68,33
Papua Barat	3	1	13	1	2	-	19	31,67
Jumlah	9	2	35	3	10	1	60	100,00

Sumber : Laporan Triwulan LLDIKTI Wilayah XIV, Papua-Papua Barat Per September 2018 (*data diolah*).

Berdasarkan data pada tabel 1, menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tinggi secara geografis lebih banyak berlokasi (terkonsentrasi secara spasial) di Provinsi Papua dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat. Untuk lebih jelasnya, sebaran lokasi lembaga pendidikan tinggi pada LLDIKTI Wilayah XIV, dapat diikuti dalam tabel 2.

Pada sisi lain, apabila dikaji lebih mendalam tampak bahwa terkonsentrasinya lembaga

pendidikan tinggi yang terjadi di Provinsi Papua tidak tersebar secara merata, tetapi hanya terjadi pada beberapa daerah tertentu saja. Hal ini terlihat dimana dari 21 kabupaten/kota di Provinsi Papua, hanya terdapat 8 kabupaten/kota yang memiliki PTS. Begitupun, di Provinsi Papua barat, dari 9 kabupaten/kota hanya terdapat 5 kabupaten/kota saja yang memiliki PTS.

Tabel 2
Jumlah PTS dan Akreditasi Institusi Menurut Kabupaten/Kota
Pada LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat
Per September 2018

Provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah PTS	Share (%)	Akreditasi Institusi	Share (%)
Papua	41	68,33	15	25,00
Kota Jayapura	14	23,33	10	16,67
Kabupaten Jayapura	2	3,33	-	0,00
Kabupaten Biak Numfor	6	10,00	1	1,67
Kabupaten Mimika	4	6,67	-	0,00
Kabupaten Merauke	6	10,00	1	1,67
Kabupaten Nabire	1	1,67	1	1,67
Kabupaten Yapen Waropen	1	1,67	-	0,00
Kabupaten Jayawijaya	7	11,67	2	3,33
Papua Barat	19	31,67	8	13,33
Kota Sorong	8	13,33	3	5,00
Kabupaten Sorong	2	3,33	1	1,67
Kabupaten Manokwari	5	8,33	3	5,00
Kabupaten Fakfak	3	5,00	-	0,00
Kabupaten Bintuni	1	1,67	1	1,67
Jumlah	60	100,00	23	38,33

Sumber : Laporan Triwulan LLDIKTI Wilayah XIV, Papua-Papua Barat Per September 2018 (*data diolah*).

Dari gambaran data-data di atas, menunjukkan bahwa terkonsentrasinya lembaga pendidikan tinggi di lokasi tertentu memberi indikasi bahwa tidak meratanya sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Papua, dan Papua Barat. Sementara di sisi lain, konsentrasi lembaga pendidikan tinggi di satu daerah dapat memperlemah kemampuan PTS dalam meningkatkan kualitasnya. Hal ini terlihat dimana sesuai data pada tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa dari 60 PTS yang ada di wilayah LLDIKTI Papua, dan Papua Barat baru sebanyak 23 PTS atau sekitar 38,33 persen PTS yang terakreditasi secara institusi.

Gambaran kondisi riil di atas, menunjukkan bahwa adanya konsentrasi lembaga pendidikan tinggi di lokasi tertentu dengan penambahan PTS dan program studinya setiap tahun jika tidak

diimbangi oleh bertambahnya tamatan SMU, maka secara otomatis setiap program studi pada suatu PTS setiap tahunnya mungkin hanya sebagian mahasiswa dalam jumlah yang sangat sedikit dan bahkan mungkin tidak sebagian samasekali. Jika hal ini terjadi, maka sampai kapan kualitas PTS dapat ditingkatkan baik melalui akreditasi program studi maupun akreditasi institusi. Sementara peran lembaga pendidikan tinggi di era globalisasi sangatlah penting, karena pendidikan tinggi merupakan salah satu sarana utama dalam rangka peningkatan sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang kompetitif.

Studi yang membahas mengenai analisis aglomerasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terkonsentrasinya lembaga pendidikan tinggi di Pulau Jawa pernah dilakukan oleh Sakti (2007).

Hasil analisisnya menunjukkan bahwa, lokasi lembaga pendidikan tinggi di Indonesia sejak tahun 1996-2003 terkonsentrasi di Pulau Jawa. Konsentrasi lembaga pendidikan tinggi sejalan dengan konsentrasi industri besar dan menengah. Berbeda dengan studi di atas, studi ini berfokus pada konsentrasi dan kualitas PTS di KTI: suatu studi pada LLDIKTI Wilayah XIV, Papua dan Papua Barat.

Fokus pemilihan lokasi dalam studi ini didasari atas beberapa alasan, terutama di KTI yang didalamnya terdapat LLDIKTI Wilayah XIV, Papua dan Papua Barat dengan membawahi Provinsi Papua dan Papua Barat, memiliki sebanyak 30 kabupaten/kota dan baru sekitar 13 kabupaten/kota atau sekitar 43,33 persen yang mempunyai PTS, dengan tingkat kualitas yang sangat rendah jika dilihat dari status akreditasi institusi baru sekitar 23 PTS atau sekitar 38,33 persen PTS yang melakukan akreditasi institusi melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Cakupan wilayah penelitian meliputi dua provinsi yaitu : Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Masalah utama yang akan ditelaah dalam studi ini adalah : *pertama*, mengapa konsentrasi PTS hanya terjadi di daerah atau lokasi tertentu saja?; *kedua*, seberapa besar kualitas PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV, dilihat dari status akreditasi program studi dan institusi; *ketiga*, apakah tingkat konsentrasi PTS, banyaknya program studi, banyaknya mahasiswa mendapat beasiswa, rasio dosen mahasiswa, jabatan fungsional dosen dan sarana infrastruktur mampu meningkatkan kualitas PTS?

Tujuan dari studi ini adalah : *pertama*, untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana konsentrasi PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV, ditinjau dari konsep teori ekonomi regional dalam hal ini aglomerasi dan klaster; *kedua*, untuk mengidentifikasi dan menganalisis seberapa besar kualitas PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV, dilihat dari status akreditasi program studi dan institusi; *ketiga*, untuk menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat konsentrasi PTS, banyaknya program studi, banyaknya mahasiswa mendapat beasiswa, rasio dosen mahasiswa, jabatan fungsional dosen dan sarana infrastruktur terhadap tingkat kualitas PTS.

Dengan demikian, hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang pada gilirannya dapat

mempersempit tingkat ketimpangan pendidikan dan meningkatkan daya saing bangsa.

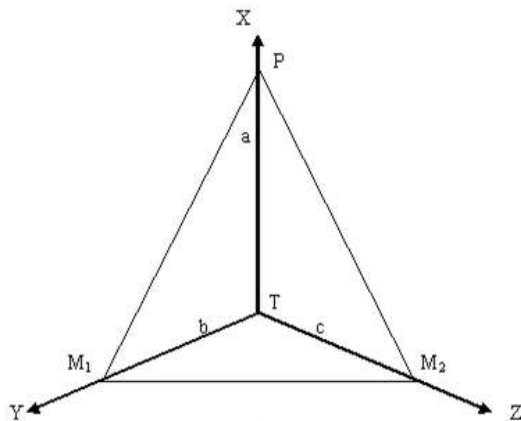
Kajian Teori

Sebagaimana diketahui, bahwa faktor lokasi adalah faktor yang sangat mempengaruhi keputusan dari suatu aktivitas ekonomi seperti aktivitas produksi atau aktivitas pemberian jasa. Tiap organisasi dari aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor lokasi. Faktor-faktor lokasi yang dimaksud adalah sejarah, faktor transportasi, faktor sumberdaya, faktor pasar, faktor tenaga kerja, faktor energi, faktor aglomerasi, faktor kenyamanan (mutu hidup, kualitas hidup atau gaya hidup), pelayanan publik setempat, pajak, insentif pemerintah (pusat dan daerah), iklim bisnis setempat, *site costs* (harga tanah dan gedung, fasilitas perkantoran dan gudang), stabilitas serta iklim politik nasional. Faktor-faktor dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi dua orientasi yakni, lima faktor pertama, kecuali faktor sejarah, disebut **orientasi transportasi**, dan faktor-faktor lainnya adalah **orientasi masukan lokal**. Yang dimaksud dengan orientasi transportasi adalah bahwa transportasi merupakan porsi terbesar dari biaya total dari organisasi suatu aktivitas ekonomi, hingga menjadi penentu keputusan lokasi, sedang yang dimaksud dengan orientasi masukan lokal adalah bahwa masukan lokal itulah yang merupakan persentase terbesar dari biaya total dan disebut lokal bila input itu tidak dapat secara efisien diangkut dari lokasi satu ke lokasi lain. Faktor-faktor yang termasuk orientasi transportasi adalah faktor-faktor lokasi klasik, sedangkan yang termasuk orientasi masukan lokal adalah faktor-faktor lokasi kontemporer (Soepono, 1999 : 7).

Penjelasan klasik tentang konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial pada umumnya merujuk pada dua macam penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*), yaitu penghematan lokalisasi (*localization economies*) dan penghematan urbanisasi (*urbanization economies*). Penghematan lokalisasi terjadi bila biaya total rata-rata (produksi) dari perusahaan-perusahaan yang sejenis (dalam suatu industri) pada lokasi yang sama turun bila jumlah produksi dari industri itu naik, sedangkan penghematan urbanisasi terjadi bila biaya total rata-rata (produksi) dari tiap perusahaan turun bila jumlah produksi dari berbagai industri di suatu lokasi yang sama naik (Soepono, 1999; Kuncoro, 2002; Kondoro, 2009; dan Sakti, 2007).

Alfred Weber, yang merupakan Bapak Teori Lokasi, yang terkenal dengan segitiga lokasi

(*locational triangle*), memperkenalkan tiga titik sudut pada segitiga lokasi itu mewakili dua lokasi input (M_1 dan M_2) dan satu lokasi pasar (X), sesuai gambar berikut.



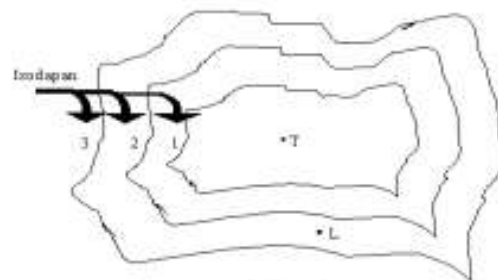
Gambar 1
Locational Triangle dari Weber

Keterangan :

- T = Lokasi optimum
- M_1 dan M_2 = Sumber bahan baku
- P = Pasar
- X, Y, Z = Bobot *input* dan *output*
- a, b, c = Jarak lokasi *input* dan *output*

Dalam menentukan mana dari tiga lokasi di atas merupakan lokasi yang meminimisasikan total biaya transpor (*optimal*), Weber juga menggunakan bobot ideal dan bobot dominan sebagai dasar penentuannya. Jadi, mana dari tiga lokasi itu yang mempunyai bobot dominan, lokasi itulah yang merupakan lokasi yang optimal. Bobot dominan adalah bobot ideal suatu input atau output yang lebih besar dari jumlah bobot ideal dari output dan bobot ideal input lainnya atau jumlah bobot ideal dari semua input itu. Bila tidak ada bobot dominan, maka analisis lebih lanjut perlu ditempuh. Analisis lebih lanjut ini menghasilkan lokasi optimal yang terletak di antara ketiga lokasi itu yang oleh Weber disebut *Isodapane*. *Isodapane* adalah kurva yang menggambarkan berbagai lokasi industri di mana di dalam wilayah kurva tertutup tersebut biaya transportasinya adalah sama. Perbedaan *isodapane* yang satu dengan lainnya karena adanya pengaruh jarak dari titik T sehingga

besarnya biaya transportasi berubah, di mana semakin jauh dari titik T, biaya transportasinya akan bertambah. Analisis yang diperluas oleh Weber ini, dengan mempertimbangkan tenaga kerja dan aglomerasi sebagai faktor-faktor lokasi lain. Menurutnya, perusahaan akan pindah ke lokasi tenaga kerja murah dari lokasi dengan biaya transpor terendah bila penghematan biaya tenaga kerja per satuan lebih rendah daripada tambahan biaya transpor. Secara grafik, lokasi tenaga kerja murah berada sebelah kiri dari *Isodapane* kritis. *Isodapane* kritis adalah selisih antara *Isodapane* yang satu (sebelah kiri) dan *Isodapane* yang lain (sebelah kanan), di mana selisih itu mencerminkan tambahan biaya transport total per satuan barang yang lebih besar dari penghematan biaya tenaga kerja per satuan yang diperoleh dari memilih lokasi tenaga kerja murah (Soepono, 1999; dan Tarigan, 2004). Gambaran mengenai hal ini dapat diikuti pada gambar berikut.



Gambar 2
Kurva *Isodapane* dari Weber

Keterangan :

- T= Lokasi biaya transportasi terendah
- L= Lokasi biaya tenaga kerja terendah

Christaller (1913), yang bukunya diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul "*Central Places in Southern Germany*" oleh C.W. Baski tahun 1966 (Tarigan, 2004 : 116-122; Isard, 1975 : 311-316), mencoba menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Model Christaller ini dikenal dengan sistem $K = 3$ Christaller, dimana ia menggambarkan modelnya dalam suatu asumsi sebagai berikut : 1) Wilayahnya adalah bersifat datar dan semuanya sama; 2) Gerakan dapat dilakukan ke segala arah (*isotropic surface*); 3) Penduduk memiliki daya beli

yang sama dan tersebar secara merata pada seluruh wilayah; 4) Konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimisasi jarak/biaya. Menurut Christaller, dari berbagai jenis barang pada orde yang sama cenderung akan bergabung pada pusat dari wilayahnya sehingga pasar tersebut akan menjadi lokasi konsentrasi (kota). Ia juga mengatakan bahwa produsen berbagai jenis barang untuk orde yang sama cenderung akan berlokasi pada titik sentral di wilayahnya dan hal inilah yang mendorong terciptanya kota. Seorang produsen yang memproduksi atau menjual lebih dari satu komoditi sekaligus pada saat yang bersamaan itu dapat diartikan bahwa ia telah memperluas *range* (luas jangkauan pasar maksimal) dari kombinasi komoditi yang dijualnya. Hal ini menunjukkan bahwa apabila jenis barang yang tersedia bertambah banyak maka *range*-nya juga bertambah luas.

Selanjutnya, model Christaller di atas, dikembangkan oleh August Lösch pada tahun 1939, yang bukunya diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1954 dengan judul *The Economics of Location*, di mana Lösch lebih melihat persoalan dari sisi permintaan (pasar). Lösch mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjual, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. Produsen harus memilih lokasi yang menghasilkan penjualan terbesar yang identik dengan penerimaan terbesar. Pandangan ini adalah mengikuti pandangan Christaller, hanya saja Lösch cenderung menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar atau di dekat pasar (Soepono, 1999; dan Tarigan, 2004).

Berbagai konsep teori lokasi tradisional di atas, jika dikaitkan dengan adanya lembaga pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja di suatu daerah, maka hal ini akan mempengaruhi luasan *range* yang dimiliki oleh lembaga dimaksud. Adanya berbagai lembaga pendidikan tinggi seperti Akademi, Sekolah Tinggi dan Universitas merupakan jenis jasa dalam orde yang sama, sehingga akan berdampak pada kecenderungan untuk berlokasi pada titik sentral di wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep teori lokasi yang dikembangkan oleh beberapa ahli di atas masih dapat diterima meskipun tidak semua asumsi yang digunakannya dapat diterima.

Definisi aglomerasi menurut Montgomery (1988), adalah sebagai konsentrasi spasial dari

aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena "penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*), yang diasosiasikan dengan klaster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen. Sedangkan menurut Markusen (1996), menyatakan bahwa aglomerasi merupakan suatu lokasi yang "tidak mudah berubah" akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa-jasa; dan bukan akibat kalkulasi perusahaan atau para pekerja individual (Koncoro, 2002; dan 2009).

Dari berbagai konsep mengenai pengertian aglomerasi dan kluster, menunjukkan bahwa sampai saat ini masih terdapat perbedaan pandangan mengenai kedua konsep dimaksud. Oleh karena itu, dari beberapa definisi yang dibuat oleh para pakar mengenai aglomerasi dan kluster, maka dapat disimpulkan sementara bahwa aglomerasi itu adalah merupakan sekumpulan kluster yang terkonsentrasi pada suatu wilayah atau daerah tertentu.

Pola lokasi yang terpadu di suatu daerah menimbulkan suatu daerah nodal yang memiliki integrasi fungsional. Integrasi fungsional bergantung berbagai kesaling bergantung. Kesaling bergantung tercermin pada berbagai hubungan-hubungan aktivitas yakni, hubungan-hubungan vertikal, hubungan-hubungan horizontal, dan hubungan-hubungan komplementer (Soepono, 1999).

Menurut Hoover dan Giarratani (1984) dalam Soepono (1999), kecenderungan bagi perusahaan-perusahaan untuk saling berdagang di daerah yang sama merupakan salah satu sebab penting terjadinya aglomerasi industri. Aglomerasi industri terjadi melalui keterkaitan ke muka (*forward linkages*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Keterkaitan ke muka terjadi bila perusahaan penghasil output (pabrik tepung) menimbulkan munculnya perusahaan pembuat produk yang terbuat dari input itu (pabrik roti), sedangkan keterkaitan ke belakang terjadi bila perusahaan pembuat barang jadi (pabrik makanan dalam kaleng) menimbulkan munculnya perusahaan yang menyediakan atau membuat input (pabrik kaleng) bagi perusahaan yang tersebut pertama. Bila dua perusahaan yang berada dalam baik dalam keterkaitan ke muka maupun keterkaitan ke belakang, saling mengadakan hubungan perdagangan, terjadi manfaat-manfaat timbal balik yang diperoleh kedua perusahaan itu yang berbagi lokasi yang

sama, seperti penghematan biaya-biaya transportasi dan komunikasi. Keterkaitan ke muka dan keterkaitan ke belakang merupakan hubungan-hubungan vertikal dari aktivitas-aktivitas ekonomi di dalam suatu daerah. Selain hubungan vertikal dalam suatu daerah, dijumpai juga hubungan-hubungan yang horisontal dan yang komplementer. Hubungan horisontal menyangkut persaingan antara aktivitas-aktivitas ekonomi (antara pabrik perakitan mobil dan pabrik perakitan mobil lain atau antara pabrik ban dengan pabrik ban lain) untuk memperoleh pasar atau input (faktor produksi). Hubungan horisontal ini dijumpai pada pola lokasi yang menyebar, sedangkan hubungan vertikal pada pola yang terpadu (*aglomerasi*). Hubungan komplementer adalah hubungan tentang peningkatan suatu aktivitas ekonomi (pemasaran sepatu) di suatu daerah yang menimbulkan pertumbuhan suatu aktivitas komplementer (pemasaran pakaian).

Menurut Soepono (1998), menyatakan bahwa kota-kota mencerminkan pusat-pusat aktivitas-aktivitas (sebagai akibat dari *dispersion* karena persaingan akan tata ruang) yang didukung oleh daerah sekitarnya. Tiap kota merupakan ajang terjadinya aglomerasi aktivitas-aktivitas. Kota-kota, terutama kota-kota besar, mempunyai peranan memelopori dalam mengembangkan suatu daerah.

Melihat pada berbagai pandangan dan realita, menunjukkan bahwa aglomerasi industri cenderung terjadi pada lokasi yang memiliki potensi serta kemampuan dalam penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan, selain itu diperoleh manfaat karena adanya kedekatan lokasi dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, daerah atau lokasi aglomerasi lebih cenderung berada pada daerah perkotaan, karena daerah perkotaan memiliki potensi dan kemampuan dalam menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh suatu industri.

Dalam kaitannya dengan konsentrasi lembaga pendidikan tinggi di lokasi tertentu, maka menurut Sakti (2007), hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Adanya konsentrasi kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan, sehingga sarana infrastruktur yang menunjang kegiatan operasional lembaga pendidikan tinggi telah terbentuk. Hal tersebut akan mempermudah lembaga pendidikan tinggi yang akan masuk di daerah yang bersangkutan karena biaya masuknya relatif lebih murah.

- b. Dengan adanya konsentrasi aktivitas ekonomi di daerah yang bersangkutan, maka hal ini akan menarik para tenaga kerja untuk mendatangi lokasi tersebut guna memperoleh pekerjaan. Banyaknya angkatan kerja yang tersedia merupakan peluang bagi lembaga pendidikan guna memperoleh pasar.
- c. Banyaknya aktivitas ekonomi yang terpusat di daerah tertentu menyebabkan tuntutan teknologi semakin meningkat, dengan peningkatan teknologi maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan serta pengetahuan yang memadai. Salah satu cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia adalah melalui jalur pendidikan sehingga kebutuhan akan lembaga pendidikan tinggi semakin meningkat di daerah ini.
- d. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah lembaga pendidikan tinggi yang selama ini menjadi pilihan utama masyarakat dalam menempuh pendidikan, sehingga daerah yang memiliki PTN akan menjadi tujuan masyarakat dalam mencari pendidikan. Kondisi tersebut akan menciptakan banyak permintaan akan adanya lembaga pendidikan tinggi lainnya sebagai alternatif apabila mereka ternyata tidak diterima di PTN. Selain itu adanya lembaga pendidikan tinggi negeri (PTN) di suatu daerah akan lebih memudahkan terjadinya permintaan spesialisasi bidang yang baru dan terkait dengan bidang yang sudah ada. Hal ini juga akan menambah besar ukuran pasar yang tersedia (*range dan threshold*).

Pada sisi lain, dalam upaya peningkatan daya saing bangsa melalui perguruan tinggi menghadapi era globalisasi, pemerintah telah menetapkan agenda pembangunan Indonesia berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) ketiga (2015-2019), adalah menetapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian dengan berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. Oleh karena itu, Kemeristekdikti berkontribusi terhadap peningkatan indeks pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi dalam upaya untuk mendukung daya saing.

Untuk mewujudkan peningkatan daya saing di atas, maka Kemenristekdikti menerapkan 5 (lima) elemen pokok yang saling mendukung satu

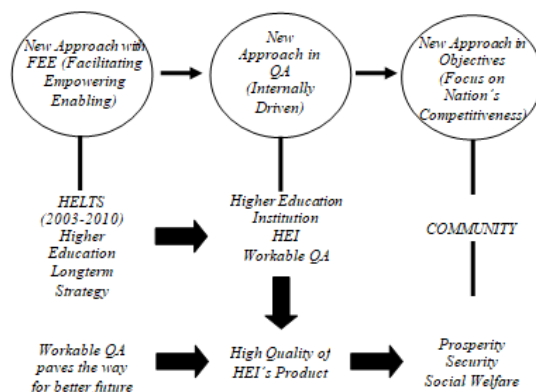
sama lainnya yaitu: *pertama*, lembaga berkualitas; *kedua*, sumber daya yang berkualitas; *ketiga*, penelitian dan pengembangan; *keempat*, tenaga terampil pendidikan tinggi; dan *kelima*, inovasi. Walaupun demikian, isu yang cukup mendasar berada pada elemen pertama, dimana konteks Kelembagaan Iptek adalah revitalisasi kelembagaan khususnya dalam upaya membangun fleksibilitas kelembagaan Iptek dan mendorong lemlitbang untuk menjadi pusat unggulan atau *center of excellence*. Selain itu, kualitas pendidikan tinggi masih relatif rendah baik dalam konteks institusi (Perguruan Tinggi) maupun program studi yang diindikasikan oleh mayoritas Perguruan Tinggi hanya berakreditasi C dan masih sangat sedikit yang berakreditasi A atau B. Disamping itu, Perguruan Tinggi Indonesia juga belum mampu berkompetisi dengan Perguruan Tinggi negara lain bahkan masih tertinggal dari negara-negara di Kawasan Asia Tenggara (Permenristekdikti, No. 50 Tahun 2017).

Karena itu untuk memenuhi harapan di atas, setiap perguruan tinggi di Indonesia diharapkan dapat memenuhi tiga kegiatan yang diarahkan pada pencapaian kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continous quality improvement*). Ketiga kegiatan dimaksud adalah : *pertama*, Akreditasi, tujuannya adalah kontrol dan audit mutu pendidikan secara eksternal yang bersifat fakultatif yang dapat dilakukan oleh BAN-PT atau lembaga lain yang berkompeten; *kedua*, **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)**, tujuannya menyediakan berbagai data penting yang berkaitan dengan perguruan tinggi yang dapat diakses dengan membuka webside dikti; *ketiga*, Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*), tujuannya adalah untuk peningkatan mutu pendidikan secara internal, yang dilakukan oleh perguruan tinggi bersangkutan (Depdiknas, Ditjen Dikti, 2003).

Proses penjaminan mutu pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kelembagaan, Iptek dan Dikti. Hal ini disebabkan, setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan, antara lain dalam hal ukuran, struktur, sumber daya, visi dan misi, sejarah, dan kepemimpinan.

Pentingnya penjaminan mutu pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi disebabkan, pada

masa-masa mendatang eksistensi perguruan tinggi tidak semata-mata tergantung pada pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) tentang mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Oleh karena itu, maka dengan mempertimbangkan penilaian *stakeholders* yang senantiasa berkembang, maka penjaminan mutu juga harus selalu disesuaikan pada perkembangan itu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Penjaminan mutu itu mempunyai arti penting, berasosiasi dengan pemikiran besar dalam Gambar berikut (Depdiknas, Ditjen Dikti, 2003).



Gambar 3
Arti Penting Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Adapun faktor-faktor yang pada umumnya terkandung di dalam proses penjaminan mutu pendidikan tinggi, antara lain rumusan atau definisi, konsep, tujuan, strategi, butir-butir mutu, proses, dan manajemen kendali mutu dalam proses penjaminan mutu pendidikan tinggi.

1. Definisi Penjaminan Mutu

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan

pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

2. Konsep Penjaminan Mutu

Pendidikan tinggi di perguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila:

- a. Perguruan tinggi tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif);
- b. Perguruan tinggi tersebut mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* (aspek induktif), berupa :
 - kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*);
 - kebutuhan dunia usaha (*industrial needs*);
 - kebutuhan profesional (*profesional needs*).

Dengan demikian perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu sebagaimana diuraikan di atas (Depdiknas, Ditjen Dikti, 2003 : 9-10).

2. METODE PENELITIAN

Sebagaimana diketahui bahwa, lokasi penelitian berada pada 2 provinsi yang berada dalam lingkup LLDIKTI Wilayah XIV (Provinsi Papua dan Papua Barat), dengan menggunakan data sekunder maupun primer.

Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara langsung kepada responden baik staf dosen/pejabat pada masing-masing PTS, maupun pada staf/Pejabat LLDIKTI Wilayah XIV. Pengambilan data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber data yang tersedia berupa laporan-laporan dari instansi terkait seperti dari LLDIKTI Wilayah XIV, Badan Pusat Statistik Provinsi : Papua dan Papua Barat.

Dalam menganalisis konsentrasi pendidikan tinggi pada studi ini, digunakan alat analisis statistik yang bermanfaat untuk : (1) mengidentifikasi lokasi industri; (2) di daerah mana mereka cenderung mengelompok secara spasial.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pola konsentrasi lembaga pendidikan tinggi di atas, digunakan proses kluster (*clustering*), yang merupakan sebuah ciri yang menonjol dari industri. Kluster secara umum didefinisikan sebagai konsentrasi geografis dari subsektor-subsektor manufaktur yang sama (Kuncoro, 2002: 179). Oleh karena itu, dalam studi ini, juga akan dilihat bagaimana dan di mana industri jasa pendidikan tinggi swasta pada LLDIKTI Wilayah XIV, Papua dan Papua Barat, berlokasi dan mengelompok. Begitupun juga, akan digunakan pengklasifikasian PTS menurut tingkat konsentrasi tinggi, sedang dan rendah sesuai pola distribusi normal. Untuk itu, dalam memenuhi distribusi normal, digunakan nilai rasio *skewness* yang harus terletak antara -2 dan 2 ($-2 < \text{Rasio Skewness} < 2$). Demikian juga dengan rasio *kurtosis*-nya ($-2 < \text{Rasio Kurtosis} < 2$) (Newbold, 1995; Sakti, 2007).

Tahapan berikutnya, akan dilakukan analisis tabel yang digunakan untuk mengetahui kondisi kualitas PTS di Kawasan Timur Indonesia (KTI) khususnya pada LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, dalam memenuhi harapan strategi jangka menengah 2015-2019 sesuai Renstra Kemenristekdikti, yang dilihat menurut tiga ketentuan pencapaian kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), yakni status akreditasi program studi dan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Deskriptif Konsentrasi PTS

Berdasarkan data yang tersedia secara geografis di LLDIKTI Wilayah XIV, menunjukkan bahwa, pada level provinsi tercatat jumlah PTS sebanyak 41 atau sebesar 68,33 persen terkonsentrasi di Provinsi Papua, sedangkan sisanya berada di Provinsi Papua Barat yakni sebesar 31,67 persen. Untuk lebih jelasnya, gambaran mengenai hal ini dapat diikuti pada tabel berikut.

Tabel 3
Jumlah PTS dan Akreditasi Institusi Menurut Kabupaten/Kota
di Kopertis Wilayah XIV Papua-Papua Barat
(Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/LLDIKTI)
Per September 2018

Provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah PTS	Share (%)	Akreditasi Institusi	Share (%)
Papua	41	68,33	15	25,00
Kota Jayapura	14	23,33	10	16,67
Kabupaten Jayapura	2	3,33	-	0,00
Kabupaten Biak Numfor	6	10,00	1	1,67
Kabupaten Mimika	4	6,67	-	0,00
Kabupaten Merauke	6	10,00	1	1,67
Kabupaten Nabire	1	1,67	1	1,67
Kabupaten Yapen Waropen	1	1,67	-	0,00
Kabupaten Jayawijaya	7	11,67	2	3,33
Papua Barat	19	31,67	8	13,33
Kota Sorong	8	13,33	3	5,00
Kabupaten Sorong	2	3,33	1	1,67
Kabupaten Manokwari	5	8,33	3	5,00
Kabupaten Fakfak	3	5,00	-	0,00
Kabupaten Bintuni	1	1,67	1	1,67
Jumlah	60	100,00	23	38,33

Sumber : Laporan Triwulan LLDIKTI Wilayah XIV, Papua-Papua Barat Per September 2018 (*data diolah*).

Walaupun demikian apabila diamati lebih mendalam mengenai distribusi PTS pada LLDIKTI Wilayah XIV, menunjukkan bahwa PTS yang terkonsentrasi di LLDIKTI Wilayah XIV tidak merata di setiap provinsi. Terdapat deviasi yang sangat tajam, ada kabupaten/kota yang sama sekali tidak memiliki lembaga pendidikan tinggi. Dari sejumlah 60 PTS pada 2 (dua) provinsi dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 30 dalam lingkup LLDIKTI Wilayah XIV, menunjukkan bahwa kebanyakan PTS hanya terkonsentrasi pada ibu kota provinsi dan kabupaten-kabupaten tertentu saja. Hal ini terlihat dimana untuk Provinsi Papua Barat terdapat 9 kabupaten/kota, baru 5 kabupaten yang ada PTS-nya (Kota Sorong 8, Kabupaten Manokwari 5, Kabupaten Fakfak 3, Kabupaten Sorong 2, dan Kabupaten Bintuni 1

PTS). Begitupun Provinsi Papua yang memiliki kabupaten/kota terbanyak yakni 21 kabupaten/kota, baru terdapat hanya 8 kabupaten/kota yang ada PTS-nya. Sedangkan jika dilihat dari kabupaten/kota yang memiliki jumlah PTS terbanyak yaitu Kota Jayapura dengan jumlah PTS sebanyak 14; Kabupaten Jayawijaya 7, Biak Numfor 6, Merauke 6, Mimika 4, Kabupaten Jayapura 2, Kabupaten Nabire 1 dan Yapen Waropen 1.

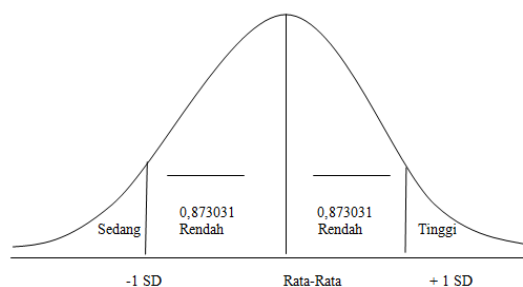
Berdasarkan data-data keberadaan PTS di atas, menunjukkan bahwa distribusi jumlah PTS tidak mengikuti distribusi normal (terjadi kemencengan). Hal ini dapat dilihat dari nilai *skewness*-nya jauh lebih besar dari nol, yaitu 1,193743 dan kurtosis 4,074321. Sementara dalam memenuhi distribusi normal, nilai rasio

skewness harus terletak antara -2 dan 2 ($-2 < \text{Rasio Skewness} < 2$). Demikian juga dengan rasio *kurtosis*-nya ($-2 < \text{Rasio Kurtosis} < 2$). Oleh karena itu, agar proses klasifikasi mendekati distribusi normal, maka dilakukan transformasi logaritma (lihat Lampiran 1 dan 2).

Selanjutnya, hasil perhitungan setelah ditransformasi logaritma menunjukkan bahwa hasilnya mendekati distribusi normal, di mana nilai rasio *skewness* terhadap *Standard Error of Skewness* terletak antara -2 dan 2 ($-2 < \text{Skewness} / \text{Standard Error of Skewness} < 2$). Demikian juga nilai rasio *kurtosis* terhadap *Standard Error of Kurtosis* yang terletak antara -2 sampai dengan 2 ($-2 < \text{Kurtosis} / \text{Standard Error of Kurtosis} < 2$).

Nilai rata-rata setelah ditransformasi logaritma adalah sebesar 1,209890 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,873031. Dari hasil ini, dapat dihitung batas klasifikasi PTS di suatu kabupaten/kota, yakni sebagai berikut : klasifikasi sedang adalah kabupaten/kota yang setelah ditransformasi logaritma berada antara nilai 0,336859 ($1,209890 - 0,873031$) dan nilai 2,082921 ($1,209890 + 0,873031$). Sedangkan untuk kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori tinggi adalah kabupaten/kota yang memiliki nilai transformasi logaritma lebih besar dari 2,082921. Begitupun juga untuk kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori

rendah adalah kabupaten/kota yang memiliki nilai transformasi logaritma lebih kecil dari 0,336859. Untuk lebih jelasnya, gambaran mengenai klasifikasi kategori tinggi, sedang dan rendah pasca transformasi logaritma dapat diikuti pada gambar berikut.



Gambar 4
Klasifikasi Kategori Tinggi, Sedang dan Rendah
PTS pada LLDIKTI Wilayah XIV, Papua dan Papua Barat
Setelah Ditransformasi Logaritma

Dari gambar 4, dapat dijelaskan secara rinci klasifikasi jumlah PTS sesuai dengan klasifikasi menurut kabupaten/kota pada LLDIKTI Wilayah XIV dapat diikuti pada tabel 4 berikut.

Tabel 4
Klasifikasi Kategori Tinggi, Sedang dan Rendah
Menurut Jumlah Perguruan Tinggi Swasta Per Kabupaten/Kota
Pada LLDIKTI Wilayah XIV, Tahun 2018

Klasifikasi PTS		
Tinggi	Sedang	Rendah
Kota Jayapura, dan Kota Sorong.	Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Fakfak.	Kabupaten Nabire, Kabupaten Yapen Waropen, dan Kabupaten Bintuni.

Sumber : Laporan Triwulan LLDIKTI Wilayah XIV, Papua-Papua Barat Per September 2018, serta Badan Pusat Statistik (*data diolah*).

Catatan : Kabupaten/Kota Lainnya yang tidak tercatat dalam tabel 3 merupakan kabupaten/kota yang tidak memiliki PTS sama sekali.

Secara geografis, klasifikasi menggambarkan bahwa yang termasuk dalam pengelompokkan sesuai tabel di atas, kelompok konsentrasi tinggi yaitu berada pada

semua kota pada setiap provinsi dalam LLDIKTI Wilayah XIV dalam klasifikasi tinggi (Kota : Jayapura, dan Sorong), memiliki sekitar 22 PTS atau 36,67 % dari total PTS. Sedangkan yang termasuk dalam klasifikasi sedang dengan jumlah PTS sebanyak 35 PTS atau sebesar 58,33 % (Kabupaten : Jayapura, Biak Numfor, Mimika, Merauke, Jayawijaya, Sorong, Manokwari, dan Fakfak), dan yang termasuk klasifikasi rendah adalah dengan jumlah PTS sebanyak 3 PTS atau sebesar 5,00 % (Kabupaten : Nabire, Yapen Waropen, dan Bintuni).

Sedangkan kabupaten yang belum memiliki PTS sama sekali, yang kalau dijumlahkan sebanyak 18 kabupaten atau sekitar 56,67 % dari total kabupaten/kota yang berada di wilayah LLDIKTI XIV. Kabupaten dimaksud adalah kabupaten : Sorong Selatan, Kaimana, Raja Ampat, Teluk Wondama, Waropen, Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul, Mappi, Asmat, Yahokimo, Tolikara, Puncak Jaya, Paniaie, Sarmi, Supiori, Membramo Raya.

3.2. Analisis Tabel Kualitas PTS

Sebagaimana diketahui, bahwa secara kualitas kondisi PTS pada LLDIKTI XIV, Papua dan Papua Barat belum sepenuhnya memenuhi

harapan strategi jangka panjang pendidikan tinggi, yang dicanangkan oleh Kemenristekdikti. Hal ini tercermin dari masih rendahnya PTS yang memenuhi dua diantara tiga kegiatan yang diarahkan pada pencapaian kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Dari tiga kegiatan untuk memenuhi kualitas Akreditasi Institusi baru sebanyak 23 PTS atau sekitar 38,33 % pada LLDIKTI Wilayah XIV, Papua dan Papua Barat. Sedangkan jika dilihat dari Akreditasi Program Studi, terdapat sebanyak 11 PTS, atau sekitar 84,62 % pada LLDIKTI Wilayah XIV. Masih adanya sekitar 2 PTS atau sekitar 15,38 % PTS yang program studinya belum diakreditasi, diakibatkan karena masih lemahnya manajemen kampus sebagai akibat dari lemahnya SDM dalam menguasai teknologi komputer. Berdasarkan data yang tersedia, tercatat bahwa jika dilihat dari status akreditasi program studi, terdapat 215 dari 238 program studi yang telah terakreditasi atau sekitar 90,34 % program studi yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Agar lebih jelasnya data yang menggambarkan hal ini dapat diikuti pada tabel 5 berikut.

Tabel 5
Jumlah Perguruan Tinggi Swasta Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Status Akreditasi Program Studi Pada LLDIKTI Wilayah XIV Per September 2018

Provinsi/Kabupaten Kota	Jumlah PTS	Jumlah Prodi	Status Akreditasi Program Studi
Provinsi Papua	41	139	123
Kota Jayapura	14	59	59
Kabupaten Jayapura	2	7	-
Kabupaten Biak Numfor	6	18	18
Kabupaten Mimika	4	14	6
Kabupaten Merauke	6	11	9
Kabupaten Nabire	1	12	12
Kabupaten Yapen Waropen	1	2	2
Kabupaten Jayawijaya	7	16	16
Provinsi Papua Barat	19	99	92
Kota Sorong	8	50	46
Kabupaten Sorong	2	26	26

Kabupaten Manokwari	5	16	13
Kabupaten Fakfak	3	6	6
Kabupaten Bintuni	1	1	1
Jumlah	60	238	215

Sumber : Laporan Triwulan LLDIKTI Wilayah XIV, Papua-Papua Barat Per September 2018, Serta BAN-PT (data diolah).

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 60 PTS yang ada di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV, yang memiliki jumlah Program Studi sebanyak 238, telah Terakreditasi oleh BAN-PT sebanyak 215 atau sekitar 90,34 % program studi yang telah diakreditasi. Walaupun demikian, sebagian besar program studi masih terakreditasi

C yakni sebanyak 149 program studi atau sekitar 69,30 %. Sedangkan sisanya terakreditasi B yakni sebanyak 66 program studi atau 30,70 %. Agar lebih jelasnya data yang menggambarkan hal ini dapat diikuti pada tabel 5 berikut.

Tabel 6
Peringkat Akreditasi Program Studi dan Institusi
Yang Terakreditasi BAN-PT
Pada LLDIKTI Wilayah XIV Per September 2018

Peringkat Akreditasi	Akreditasi Program Studi	Akreditasi Institusi
A	-	-
B	66	3
C	149	20
Jumlah	215	23

Sumber : Laporan Triwulan LLDIKTI Wilayah XIV, Papua-Papua Barat Per September 2018, Serta BAN-PT (data diolah).

Melihat pada data di atas, menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV telah melakukan akreditasi baik akreditasi program studi maupun institusi, tapi kelihatannya masih di atas 50 % program studi yang menyandang predikat C. hal ini menunjukkan bahwa, manajemen pengelolaan PTS perlu menjadi perhatian utama, yang tentu dengan meningkatkan kinerja Unit Penjaminan Mutu pada setiap PTS, sehingga kualitas PTS dapat ditingkatkan melalui peringkat akreditasi.

Begitupun juga, lambatnya PTS dalam memenuhi peringkat akreditasi yang lebih tinggi, tampaknya selain diakibatkan oleh karena lemahnya SDM, tetapi juga sebagian besar diakibatkan oleh lemahnya kemampuan PTS dalam membiayai berbagai aktivitas institusi. Dari sisi SDM, terlihat sekali dimana sebagian besar SDM pada PTS yang berada di Wilayah LLDIKTI

Wilayah XIV, masih memiliki banyak kelemahan. Untuk Staf Pengajar misalnya, banyak yang memiliki Jabatan Fungsional (*Pangkat Akademik*) yang belum memadai. Adanya Staf Pengajar yang memiliki Jabatan Fungsional rendah atau bahkan ada yang belum memiliki jabatan fungsional samasekali, tampaknya sebagai akibat dari lemahnya PTS dalam memfasilitasi pembiayaan unsur Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara di sisi lain, kemampuan Pemerintah melalui LLDIKTI Wilayah XIV dalam membiayai penelitian untuk setiap tahunnya memberikan syarat yang cukup tinggi bagi Skema Penelitian Dasar maupun Penelitian Terapan sesuai Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018, mensyaratkan Ketua Pengusul harus memiliki rekan jejak Publikasi

minimal 2 artikel di *database* terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis utama. Hal ini dirasa sangat memberatkan staf pengajar, khususnya yang berada pada LLDIKTI Wilayah XIV.

Pada sisi lain, jika dilihat dari kemampuan PTS dalam membiayai berbagai aktivitas institusi, tampaknya bukan sebagai akibat dari tidak berimbangnya harga jual pendidikan atau karena PTS tidak punya harga jual, tetapi karena PTS di lingkungan LLDIKTI diperhadapkan dengan tingkat konsentrasi yang sedang dan tinggi pada kabupaten/kota, serta berada pada lingkungan masyarakat kelas menengah ke bawah yang rata-rata menyekolahkan anaknya dengan pendapatan yang pas-pasan, dan bahkan ada yang kuliah dengan mengharapkan beasiswa, sehingga PTS sulit untuk menaikkan pembebanan biaya studi, baik melalui sumbangan pembangunan, biaya administrasi maupun SKS-nya. Sementara di sisi lain, tidak semua mahasiswa mendapat beasiswa karena harus mampu berkompetisi untuk mendapat beasiswa.

4. KESIMPULAN

Simpulan utama *pertama* yang dapat diambil dari hasil analisis adalah bahwa berdasarkan data, terlihat bahwa secara geografis pada LLDIKTI Wilayah XIV, menunjukkan bahwa pada level provinsi jumlah PTS 68,33 persen terkonsentrasi di Provinsi Papua, dan sisanya berada di Provinsi Papua Barat yakni sebesar 31,67 persen. Sedangkan jika dilihat dari level kabupaten/kota, secara geografis menunjukkan bahwa tampaknya, semua kota pada setiap provinsi dalam Wilayah LLDIKTI XIV masuk dalam klasifikasi tinggi (kota : Jayapura, dan Sorong) yang memiliki sekitar 22 PTS atau 36,67 % dari total PTS. Sedangkan yang termasuk dalam klasifikasi sedang dengan jumlah PTS sebanyak 35 PTS atau sebesar 58,33 % (Kabupaten : Jayapura, Biak Numfor, Mimika, Merauke, Jayawijaya, Sorong, Manokwari, dan Fakfak), dan yang termasuk klasifikasi rendah adalah dengan jumlah PTS sebanyak 3 PTS atau sebesar 5,00 % (Kabupaten : Nabire, Yapen Waropen, dan Bintuni). Sedangkan kabupaten yang belum memiliki PTS sama sekali, yang kalau dijumlahkan sebanyak 18 kabupaten atau sekitar 56,67 % dari total kabupaten/kota yang berada di wilayah LLDIKTI XIV. Kabupaten dimaksud adalah kabupaten : Sorong Selatan, Kaimana, Raja Ampat, Teluk Wondama, Waropen, Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul, Mappi, Asmat,

Yahokimo, Tolikara, Puncak Jaya, Paniae, Sarmi, Supiori, Membramo Raya.

Simpulan utama *kedua* adalah, berdasarkan pembahasan dengan menggunakan analisis tabel, terlihat bahwa secara kualitas kondisi PTS pada LLDIKTI XIV, Papua dan Papua Barat belum sepenuhnya memenuhi harapan strategi jangka panjang pendidikan tinggi, yang dicanangkan oleh Kemenristekdikti. Hal ini tercermin dari masih rendahnya PTS yang memenuhi dua di antara tiga kegiatan yang diarahkan pada pencapaian kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Dari tiga kegiatan untuk memenuhi kualitas Akreditasi Institusi baru sebanyak 23 PTS atau sekitar 38,33 % pada LLDIKTI Wilayah XIV, Papua dan Papua Barat. Sedangkan jika dilihat dari Akreditasi Program Studi, terdapat sebanyak 11 PTS, atau sekitar 84,62 % pada LLDIKTI Wilayah XIV. Masih adanya sekitar 2 PTS atau sekitar 15,38 % PTS yang belum dapat melakukan akreditasi program studinya, diakibatkan karena masih lemahnya manajemen kampus sebagai akibat dari lemahnya SDM dalam menguasai teknologi komputer. Berdasarkan data yang tersedia, tercatat bahwa jika dilihat dari status akreditasi program studi, terdapat 215 dari 238 program studi yang telah terakreditasi atau sekitar 90,34 % program studi yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Walaupun demikian kelihatannya masih di atas 50 % program studi yang menyandang predikat C. hal ini menunjukkan bahwa, manajemen pengelolaan PTS perlu menjadi perhatian utama, yang tentu dengan meningkatkan kinerja Unit Penjaminan Mutu pada setiap PTS, sehingga kualitas PTS dapat ditingkatkan melalui peringkat akreditasi.

Simpulan utama *ketiga* adalah, berdasarkan pembahasan terlihat bahwa lambatnya PTS dalam memenuhi peringkat akreditasi yang lebih tinggi, tampaknya selain diakibatkan oleh karena lemahnya SDM, tetapi juga sebagian besar diakibatkan oleh lemahnya kemampuan PTS dalam membiayai berbagai aktivitas institusi. Dari sisi SDM, terlihat sekali dimana sebagian besar SDM pada PTS yang berada di Wilayah LLDIKTI Wilayah XIV, masih memiliki banyak kelemahan. Untuk Staf Pengajar misalnya, banyak yang memiliki Jabatan Fungsional (*Pangkat Akademik*) yang belum memadai. Adanya Staf Pengajar yang memiliki Jabatan Fungsional rendah atau bahkan ada yang belum memiliki jabatan fungsional samasekali, tampaknya sebagai akibat dari lemahnya PTS dalam memfasilitasi pembiayaan

unsur Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara di sisi lain, kemampuan Pemerintah melalui LLDIKTI Wilayah XIV dalam membiayai penelitian untuk setiap tahunnya memberikan syarat yang cukup tinggi bagi Skema Penelitian Dasar maupun Penelitian Terapan sesuai Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018, mensyaratkan Ketua Pengusul harus memiliki rekan jejak Publikasi minimal 2 artikel di *database* terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis utama. Hal ini dirasa sangat memberatkan staf pengajar, khususnya yang berada pada LLDIKTI Wilayah XIV.

Simpulan utama *keempat* adalah, berdasarkan pembahasan, jika dilihat dari kemampuan PTS dalam membiayai berbagai aktivitas institusi, tampaknya bukan sebagai akibat dari tidak berimbangnya harga jual pendidikan atau karena PTS tidak punya harga jual, tetapi karena PTS di lingkungan LLDIKTI diperhadapkan dengan tingkat konsentrasi yang sedang dan tinggi pada kabupaten/kota, serta berada pada lingkungan masyarakat kelas menengah ke bawah yang rata-rata menyekolahkan anaknya dengan pendapatan yang pas-pasan, dan bahkan ada yang kuliah dengan mengharapkan beasiswa, sehingga PTS sulit untuk menaikan pembebanan biaya studi, baik melalui sumbangan pembangunan, biaya administrasi maupun SKS-nya. Sementara di sisi lain, tidak semua mahasiswa mendapat beasiswa karena harus mampu berkompetisi untuk mendapat beasiswa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, 2006, *Papua Barat Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2006, *Papua Dalam Angka*.
- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2003, *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi*, Jakarta, 1 Oktober.
- Gujarati D.N., (2003). *Basic Econometrics*, Fourth Edition, McGraw-Hill Companies, Inc, The International Edition.
- Isard W., (1999). *Introduction to Regional Science*, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.
- Kuncoro M., (2002), *Analisis Spasial dan Regional : Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- _____, (2009), *Ekonomika Indonesia, Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Lembaga Layanan DIKTI Wilayah XIV Papua, dan Papua Barat, *Laporan Tahunan Per-September 2018*.
- LLDIKTI Wilayah XIV, (2018), *Laporan Triwulan Perkembangan PTS Per September 2018*.
- Maddala G.S., (1992), *Introduction to Econometrics*, Second Edition, MacMillan Publishing Company, New York.
- Newbold P., (1995), *Statistics For Business And Economics*, Fourth Edition, by Prentice-Hall, Inc., A Simon & Schuster Company, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Permenristekdikti RI (2017), *Nomor 50 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019*.
- Ramanathan R., (1992), *Introductory Econometrics With Application*, Second Edition, by Harcourt Brace Jovanovich, Inc., USA.
- Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Ristekdikti (2015), *Rencana Strategis Ristek Dikti 2015-2019*.
- Sakti T.A.A., (2007), "Analisis Aglomerasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terkonsentrasinya Lembaga Pendidikan Tinggi di Pulau Jawa", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 22, No. 1, FE UGM, Yogyakarta.
- Soepono P., (1999), "Teori Lokasi : Representasi Landasan Mikro bagi Teori Pembangunan Daerah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 4, FE UGM, Yogyakarta.
- Tarigan R., (2004), *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Wooldridge J.M., (2000), *Introductory Econometrics : A Modern Approach*, by South-Western College Publishing, a division of Thomson Learning.